

Jokowi Bertemu Perwakilan KAHMI di Istana Bogor, Akbar Tanjung Ikut Hadir

BOGOR (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/9).

Dalam pertemuan itu, politisi senior yang juga mantan Ketua DPR RI Akbar Tanjung ikut hadir. Selain Akbar, dalam pertemuan itu juga tampak mantan Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas.

Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI, Ahmad Doly Kurnia Tanjung, menyampaikan, dalam pertemuan perwakilan KAHMI mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dalam musyawarah nasional (munas) yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang.

"Korps Alumni Perhimpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI akan melaksanakan munas nanti pada tanggal 24 sampai 27 November 2022. Tadi kami sudah mendengarkan kesediaan beliau (Presiden) untuk hadir di Palu, Sulawesi Tengah untuk membuka acara KAHMI," ujar Ahmad Doly yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan terkait peran KAHMI ke depan untuk turut berkontribusi dalam pembangunan nasional.

"Tadi juga kami sudah mendapatkan arahan dan bimbingan tentang peran-peran KAHMI ke depan, sehingga bisa memberikan kontribusi terbaik juga buat pembangunan," katanya.

Pada pertemuan tersebut, Presiden juga menggambarkan situasi sulit yang sedang dihadapi Indonesia bahkan dunia saat ini. Pemerintah bersyukur Indonesia termasuk salah satu negara yang dinilai cukup baik dalam menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional.

Meski demikian, lanjut Ahmad Doly, presiden berharap agar seluruh elemen bangsa, termasuk KAHMI, dapat terus bersinergi untuk mempertahankan situasi itu. Kepala Negara juga mendorong KAHMI untuk ikut berkontribusi dalam kemajuan Indonesia di masa yang akan datang.

"Tadi pesannya Pak Presiden adalah agar kita (KAHMI) bisa ikut juga menjelaskan kepada masyarakat tentang situasi ini dan kemudian berupaya untuk bisa terus bangkit untuk kemajuan Indonesia di masa yang akan datang," katanya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. ● **mei**

Gugatan Ditolak PTUN Jakarta, Eks Pegawai KPK Akan Banding

JAKARTA (IM) - Mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat karena dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan mereka.

"Kami rencana akan mengajukan banding," kata eks pegawai KPK Ita Khoiriyah saat dihubungi wartawan, Jumat (30/9).

Ita Khoiriyah, mengaku saat ini pihaknya sedang mempelajari berkas putusan PTUN Jakarta. Tata-panggilan Ita -- juga menuturkan pihaknya belum mengetahui kapan timnya akan mengajukan banding.

"Waktunya belum tahu, secepatnya," ujar Tata.

Sementara itu, mantan pegawai KPK lainnya Hotman Tambunan juga menyampaikan hal yang sama. Menurut Hotman, hingga proses TWK yang dinilai sarat dengan pelanggaran HAM dan maladministrasi tidak dikembalikan ke jalan yang benar dan diterima akal sehat, pihaknya akan mengajukan banding.

"Kami akan mempertimbangkan untuk banding," kata Hotman.

Sebelumnya, KPK, Badan Kepegawaian Ne-

gara (BKN), dan Presiden Joko Widodo dinilai tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI seperti terkait pemulih status dan nama baik pegawai KPK yang dipecat serta adanya dugaan maladministrasi.

Sebab itu, sejumlah eks pegawai KPK menggugat KPK, BKN, dan Presiden Jokowi ke PTUN Jakarta karena dinilai tidak menjalankan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman RI.

Tata, Hotman, dan rekan-rekannya menggugat KPK, BKN, dan Jokowi ke PTUN Jakarta dalam dua nomor perkara berbeda yakni, Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN. JKT yang diajukan Hotman Tambunan, Harun Al Rasyid, dan lainnya. Kemudian perkara Nomor: 46/G/TF/2022/PTUN, JKT yang diajukan Ita Khoiriyah dan kawan-kawan. Namun, Hakim Pengadilan PTUN Jakarta menolak gugatan mereka.

"Dalam pokok perkara menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya," bunyi amar putusan dua perkara tersebut, sebagaimana dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Jumat (30/9). ● **mei**

Sudah 67 Judicial Review Terkait Presidential Threshold 20% Ditolak MK

JAKARTA (IM) - Hingga saat ini sudah 67 pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait *Judicial Review* (JR) *Presidential Threshold* 20 persen, namun semuanya ditolak.

Salah satunya adalah JR yang dilayangkan PKS terkait *Presidential Threshold* 20 persen juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

"Total ada 67 pihak yang mengajukan sebagai pihak terkait untuk urun rembug dalam membahas *Presidential Threshold* ini di sidang MK. Sayangnya, sebagaimana dengan kami, mereka tidak diberikan kesempatan dan ruang luas untuk menjelaskan dan membuktikan gagasannya," ujar Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Zainudin Paru, Jumat (30/9).

Zainudin Paru menyoroti keputusan MK yang dia anggap terburu-buru karena tanpa memberikan kesempatan bagi penggugat untuk menyampaikan pembuktian.

"MK tidak memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pembuktian, sehingga langsung terburu diputuskan pasca sidang pemeriksaan pendahuluan," katanya.

Sebagaimana diketahui, partai politik yang bisa mengajukan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024 adalah parpol yang memiliki perolehan suara di atas 20 persen. Batas pengurangan capres/cawapres untuk Pemilu 2024 sudah ditetapkan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi:

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya."

Dengan demikian partai politik atau gabungan partai politik yang hendak mengusung Capres-Cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dalam Pemilu 2024 harus memenuhi salah satu syarat yang disebutkan di atas yakni minimal meraih 25% dari suara sah nasional atau minimal 20% dari total kursi DPR RI.

Saat ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui sedang menjalin komunikasi intensif dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat. ● **mei**

2 Polhukam

FOTO: ANT



KUNJUNGAN KAPAL ANGKATAN LAUT

KERAJAAN INGGRIS DI BALI

Anggota TNI AL menyambut kedatangan Kapal Angkatan Laut Kerajaan Inggris His Majesty's Ship (HMS) Spey di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Jumat (30/9). Kapal perang Inggris yang menjalankan misi di kawasan Indo-Pasifik untuk membantu mengatasi tantangan di sektor keamanan dan mendukung negara-negara dalam mengatasi dampak perubahan iklim tersebut mengunjungi Bali mulai 30 September 2022 hingga 3 Oktober 2022 untuk melakukan pertukaran budaya dengan TNI Angkatan Laut dan anak-anak dari sanggar tari Bali.

Paulus Waterpauw Kutuk Keras KKB yang Serang Pekerja Jalan Trans Papua Barat

KKB Papua kembali berulah menyerang warga sipil yang sedang bekerja membangun jalan Trans Pua Barat. Warga diminta ikut bantu aparat untuk menangkap parapelaku.

MONOKOARI (IM) - Pejabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengutuk keras anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyerang warga sipil pekerja jalan Trans-Papua Barat rute Bintuni-Maybrat pada Kamis (29/9) sore.

"Selaku Pj. Gubernur Papua Barat, saya mengutuk kebiadaban KKB tersebut," kata Waterpauw, Jumat (30/9). Mantan Kabaintelkam Polri ini mengaku sudah berkomunikasi dengan pimpinan TNI dan Polri di Papua Barat agar

mengambil langkah cepat dan tegas untuk mengevakuasi korban selamat maupun meninggal dunia dalam serangan tersebut.

"Kepada Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Daniel Tah Monang Silitonga agar mengambil langkah evakuasi para korban dari lokasi kejadian, dan segera menangkap KKB tak berperikemanusiaan itu," ujar Waterpauw.

Waterpauw juga mengimbau masyarakat Papua Barat,

terutama warga perkampungan sekitar lokasi kejadian, agar tidak panik.

Ia pun berharap kepada mereka ikut membantu aparat untuk menangkap para pelaku kriminal tersebut.

"Karena aparat keamanan segera menangani para pelaku, masyarakat agar tetap tenang dan bantu aparat untuk menumpas kelompok ini secepat mungkin," kata Waterpauw.

Sebelumnya, Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Adam Erwindi membenarkan peristiwa penyerangan oleh orang tak dikenal (OTK) terhadap 12 orang pekerja jalan Trans-Papua Barat sesuai dengan laporan Kapolres Teluk Bintuni AKBP Junov Siregar.

"Informasi didapat sekitar pukul 18.20 WIT dari Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK

136/TS Kampung Mayerga, Distrik Moskona Barat kepada Polres Teluk Bintuni tentang peristiwa penembakan yang dilakukan oleh OTK," ujar Kabid Humas mengutip laporan Kapolres Teluk Bintuni.

Kabid Humas mengatakan bahwa gabungan personel TNI dan satuan Brimob Teluk Bintuni sudah mengevakuasi satu korban luka tembak dari sekitar lokasi kejadian ke Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK 136/TS Kampung Mayerga.

Akibat serangan tersebut, kata dia, seorang pekerja mengalami luka tembak di bagian tangan kanan sementara 12 pekerja lainnya melarikan diri dari dari tempat kejadian dan melapor ke Pos Satgas Satuan Organik Yonif RK 136/TS Kampung Mayerga. Sementara sebelumnya,

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) wilayah Kodap IV Sorong Raya, merilis sejumlah gambar dan video terbaru dan mengaku bertanggung jawab atas penyerangan serta penembakan terhadap sejumlah pekerja Jalan Trans Papua Barat pada di perbatasan kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Maybrat.

Juru Bicara TPNPB - OPM KKB Teroris, Seby Sambom mengatakan, sebanyak empat orang pekerja yang dituduh sebagai intelijen ditembak mati oleh Pasukan TPNPB - OPM Wilayah Kodap IV Sorong Raya. Dikatakan Seby, pihaknya menerima laporan salinan gambar video dan beberapa foto dari Komandan Operasi TPNPB - OPM Kodap IV Sorong Raya, Mayor Arnoldus Yancen Kocu. ● **han**



FOTO: ANTARA

PEMERINTAH MENARGETKAN TINGKAT KEMISKINAN TURUN

Warga beraktifitas di perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara Jumat, (30/9). Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun di kisaran 7,5 persen hingga 8,5 persen pada tahun 2023. Target tersebut lebih rendah dari target kemiskinan tahun ini yang ditargetkan sebesar 8,5 persen hingga 9 persen.

DPR Mendadak Ganti Hakim MK Aswanto dengan Guntur Hamzah, Ada Apa?

JAKARTA (IM) - DPR mendadak mengganti Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) atau Hakim Konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK. Pergantian dilakukan saat Rapat Paripurna DPR, Senin (29/9) siang.

Hal ini diputuskan berdasarkan hasil rapat Komisi III DPR yang dilakukan pada Senin (29/9) pagi, di mana ada 5 (lima) fraksi setuju, 1 (satu) fraksi menerima dengan catatan, 1 (satu) fraksi menolak, dan 2 (dua) fraksi tidak hadir.

Anggota Komisi III DPR Habiburrokhman menjelaskan, pergantian mendadak itu dilakukan menindaklanjuti surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengkonfirmasi perihal kelanjutan 3 hakim konstitusi usulan DPR yakni, Arief Hidayat, Aswanto dan Wahidudin Adams, hingga akhirnya memutuskan untuk mengganti Aswanto dengan Guntur tanpa ada penjelasan lebih lanjut.

"Ya kurang lebih kan ada surat dari MK, mengkonfirmasi 3 hakim yang ditunjuk DPR itu, tentu MK maknanya tindakan hukum dengan mengirim surat konfirmasi ke DPR, maknanya tadi kami bersikap yaitu 3 hakim MK tersebut yang 2 tetap, yang satu Aswanto digantikan Profesor Guntur Hamzah,"

kata Habiburrokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/9).

Saat ditanya alasannya, politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa putusan itu didasarkan pada surat MK tersebut, yang diterima DPR pada pekan lalu. "Ya itu, berdasarkan surat MK itu, MK berkirin surat kepada kami. Ya itu kami jawab," terangnya.

Terkait adanya isu beda penafsiran terkait Surat MK, Habiburrokhman mengakui ada dialog dalam rapat Komisi III DPR, namun akhirnya ada keputusan yang sudah disahkan di Rapat Paripurna DPR.

"Enggak (ada beda tafsir), emang ada dialog, kan pada akhirnya diputuskan, itu akhirnya menjadi keputusan," ujar Habiburrokhman.

Saat dikonfirmasi kembali perihal beda tafsir surat tersebut, Habiburrokhman kembali membantah dan faktanya hal itu sudah diputuskan.

Mengenai adanya Fraksi Demokrat yang menolak, Habiburrokhman mempersialkan media untuk menanyakan langsung pada Demokrat. Faktanya, itu sudah dirapatkan pada Rabu (28/9) dan Kamis (29/9) pagi, dan sudah ditanyakan kesediaan dari Guntur Hamzah dan mayoritas fraksi menyetujui.

"Ya intinya seluruh putusan Komisi III memutuskan itu, mayoritasnya itu,"

tegasnya.

Adapun alasan memilih Guntur, Habiburrokhman menjelaskan, Gerindra menyetujui karena memahami bahwa Guntur adalah sosok yang paling mengerti soal hukum konstitusi, dia juga menjabat Sekjen MK dan sebelumnya juga sudah lama di MK. Dan yang paling penting, Guntur adalah orang yang mempromosikan yang namanya *constitutional complaint*.

"*Constitutional complaint* semacam permohonan, semacam gugatan ke MK apabila rakyat merasa hak konstitusinya dilanggar. Selama ini kan itu kekosongan hukum, profesor Guntur ini salah satu yang berpedapat dengan Habiburrokhman soal *constitutional complaint* itu, maknanya kalau saya dengar nama Guntur saya 100% mendukung ya," tandasnya. ● **mei**

PENGUMUMAN PENURUNAN MODAL PT. CABLENET FIBER DATA
PT. CableNet Fiber Data, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas (Sirkuler) Sebagai Sekretaris Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 28 September 2022, Para Pemegang Saham telah menyetujui atas penurunan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari semua modal dasar sebesar Rp.40.040.000.000,- (empat puluh milyar empat puluh juta rupiah) dan modal ditempatkan serta disetor sebesar Rp.10.010.000.000,- (sepuluh milyar sepuluh juta rupiah) menjadi modal dasar sebesar Rp.14.200.000.000,- (empat belas milyar dua ratus juta rupiah), dan modal ditempatkan serta modal disetor sebesar Rp.3.550.000.000,- (tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat mengajukan keberatan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini kepada Perseroan, dengan alamat:

PT. CABLENET FIBER DATA
Jalan Mtsakive Raya No. 24, RT006/RW.006
Kel. Grogol, Kec. Grogol Petamburan,
Jakarta Barat - DKI Jakarta
Jakarta, 01 Oktober 2022
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN PENGAMBIL ALIHAN SAHAM
Bahwa akan ditanda tangani Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT MANADO TIKA MEDICAL CENTRE, berkedudukan di Kota Manado, dengan kedudukan diantaranya menyetujui pengalihan sebagian besar saham perseroan kepada Pihak Ketiga, sehubungan dengan hal tersebut apabila ada pihak-pihak yang keberatan silahkan menghubungi Direksi perseroan, pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 30 September 2022
Direksi
ttd
YOHANES BOBBY ISHAK TUMGOLUNG, MBA

PENGUMUMAN
Dengan ini diumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT GMM LOGISTIK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara (Perseroan), tertanggal 17 Juni 2022, telah disetujui untuk menurunkan modal dasar Perseroan menjadi berjumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah), serta menurunkan modal ditempatkan dan di setor Perseroan menjadi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dengan menurunkan nilai nominal saham Perseroan menjadi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut maka kami, Direksi memberitahukan dan mengumumkan kepada semua Kreditur dan pihak lainnya apabila ada keberatan/sanggahan atas penurunan modal tersebut, dapat menyampaikan keberatan/sanggahan disertai alasannya kepada kami di Jl. Gading Kencana Utara Blok G 10 No 47, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam waktu 60 hari kalender sejak pengumuman ini. Demikianlah Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 jo 45 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta
SONNY AUJUDINATA
Direktur